

**PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BETI BACHAO BETI
PADHAO PADA PEMERINTAHAN NARENDRA MODI 2014-2024
SKRIPSI**



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

VELICIA TASYA AZZAHRA

21323074

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025**

**PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BBBP DI BAWAH
PEMERINTAHAN NARENDRA MODI DALAM MENGATASI
KETIMPANGAN PENDIDIKAN PEREMPUAN DI INDIA 2014-2024**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi Sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat S1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

VELICIA TASYA AZZAHRA

21323074

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

**PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BETI BACHAO BETI
PADHAO PADA PEMERINTAHAN NARENDRA MODI 2014-2024**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
- 2 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P. M.Sc.
- 3 Gustrieni Putri, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan

Karina

Hadza

Gustrieni

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 16 Juli 2025



Yencia Tasya Azzahra

ABSTRAK

Berangkat dari konflik diskriminasi dan ketidaksetaraan gender, perempuan di India tidak merasakan kesetaraan yang sama dengan laki-laki dalam bidang pendidikan, politik, sosial, dan budaya. Narendra Modi mengeluarkan kebijakan Beti Bachao Beti Padhao untuk meningkatkan rasio kesetaraan gender khususnya meningkatkan pendidikan bagi perempuan di India. Untuk menganalisis konflik tersebut, maka penulis menggunakan kerangka pemikiran Thomas B. Smith dengan judul “*The Policy Implementation Process*”. Dengan mengidentifikasi proses implementasi kebijakan yaitu *Idealized Policy, Target Group, Implementation Organization, Environmental Factors, Tensions, Transactions, Institutions, Feedback*. Dalam penelitian ini menemukan kontribusi positif dalam skema Beti Bachao Beti Padhao serta penelitian ini juga menemukan bahwa kolaborasi antara pemerintah, NGO, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan perempuan.

Kata-kata kunci: Kebijakan Pendidikan, Kesetaraan Gender, Ketimpangan Pendidikan, Narendra Modi.

ABSTRACT

Starting from the conflict of discrimination and gender inequality, women in India do not enjoy the same equality as men in the fields of education, politics, society, and culture. Narendra Modi issued the Beti Bachao Beti Padhao policy to improve gender equality, particularly by improving education for women in India. To analyze this conflict, the author uses Thomas B. Smith's framework entitled “*The Policy Implementation Process*.” By identifying the policy implementation process, namely *Idealized Policy, Target Group, Implementation Organization, Environmental Factors, Tensions, Transactions, Institutions, and Feedback*, this study found positive contributions in the Beti Bachao Beti Padhao scheme. This study also found that collaboration between the government, NGOs, and the community is necessary to create an environment that supports women's education

Keywords: *Education Policy, Gender Equality, Educational Inequality, Narendra Modi.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Cakupan penelitian	8
1.5 Tinjauan Pustaka	10
1.6 Kerangka Pemikiran	13
1.7 Argumen Sementara	17
1.8 Metode Penelitian	18
1.8.1 Jenis Penelitian	18
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	19
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	19
1.8.4 Proses Penelitian.....	19
1.9 Sistematika Pembahasan	19
BAB 2 EMPAT KOMPONEN UTAMA DALAM PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN.....	21
2.1 <i>Idealized Policy</i>	21
2.2 <i>Target Group</i>	24
2.3 <i>Implementation Organization</i>	27
2.4 <i>Environmental Factors</i>	31
2.4.1 Hambatan Budaya	32
2.4.2 Tantangan Ekonomi.....	33

2.4.3 Fasilitas yang kurang memadai	34
BAB 3 PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	36
3.1 <i>Tensions</i>	36
3.2 <i>Transactions</i>	41
3.3 <i>Institutions</i>	43
3.4 <i>Feedback</i>	48
BAB 4 PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Rekomendasi	56
DAFTAR PUSTAKA	57

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman yang modern ini, kekerasan kultural dan ketidaksetaraan gender merupakan isu yang sering kita temui di berbagai belahan dunia termasuk salah satunya adalah India. Hal ini dikarenakan adanya budaya patriarki yang menempatkan kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Dalam hal ini perempuan tidak mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki dan dipandang sebelah mata oleh kaum laki-laki. Hal ini tentu menjadi pemicu kemarahan publik yang dimana seharusnya perempuan mendapatkan hak dan keadilan yang sama seperti kaum laki-laki. Kekerasan dan ketidaksetaraan gender dianggap konflik yang sepele karena korban dianggap lemah (Salamor and Salamor 2022).

India merupakan salah satu negara yang memiliki status sosial seperti perbedaan kasta, yang dimana terdapat perbedaan kasta tinggi dan kasta rendah. Hal ini menimbulkan ketidaksetaraan gender terhadap perempuan di India. Isu mengenai ketidaksetaraan gender yang terjadi di India selalu menarik perhatian masyarakat global dikarenakan hal penting yang tidak dapat diganggu gugat karena adanya konsep hak asasi manusia terutama pada wanita di India. Jika melihat dari budaya yang ada di India, kedudukan perempuan selalu dipandang rendah oleh laki-laki dengan tatanan patriarki, yang dimana perempuan akan selalu bergantung kepada laki-laki. Mereka mendapatkan perilaku diskriminatif dan perilaku tidak adil baik

dalam aktivitas politik, pendidikan, ekonomi, bahkan sosial di negara mereka sendiri (Audina, n.d., 2022).

Pada zaman dahulu, India telah menganut sistem kasta dan budaya patriarki pada tahun 1200 SM sehingga pada saat ini sistem tersebut masih banyak dianut dan diimplementasikan. Oleh karena itu, India masih saja memiliki konflik dan permasalahan yang tak kunjung usai dari dahulu. Dampak buruk dari sistem ini adalah adanya diskriminasi terhadap perempuan. Pada tahun 2017 sebanyak 32% perempuan di India tidak mendapatkan pendidikan karena dianggap tidak diperlukannya pendidikan terhadap perempuan karena adanya ketidaksetaraan gender. Karena kurangnya faktor pendidikan yang diberikan kepada perempuan, maka orang tua laki-laki beranggapan bahwa akses pendidikan bagi anak laki-laki lebih diutamakan (*The Borgen Project* 2019).

Perempuan di India memilih untuk tidak melanjutkan sekolah dikarenakan tanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga maupun menjadi pekerja di usia dini karena kurangnya pendidikan. Banyak kasus ketimpangan pendidikan dalam kehidupan sehari-hari terkhususnya adalah perempuan yang berkasta rendah dan kaum minoritas. Hal ini kerap terjadi di berbagai wilayah di India seperti perempuan dalit yang menandakan bahwa ketimpangan gender dan kebebasan atau hak perempuan tidak terjangkau dan sering diabaikan di India. Mereka lebih mengutamakan kebudayaan, adat, bahkan tradisi yang nantinya menyebabkan konflik domestik yang akan memecah belah warga negaranya. Namun hal ini sangat sulit dihilangkan begitu saja karena sudah tertanam sejak dahulu (Setiya Farisca et al., n.d., 2023).

Di India, budaya patriarki masih mendominasi, yang berarti perempuan seringkali dianggap rendah nilainya dibandingkan dengan laki-laki. Mereka sering mengalami ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Banyak perempuan di India tidak memiliki akses yang sama dengan laki-laki dalam menikmati kehidupan modern, seperti akses pendidikan yang lebih tinggi. Meskipun India mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun kesetaraan gender masih belum sepenuhnya tercapai. Salah satu masalah serius yang masih dihadapi oleh India adalah banyaknya perempuan yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas.

Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dan melawan praktik-praktik yang merugikan perempuan di India, masih ada banyak kasus ketidaksetaraan gender yang harus diperhatikan untuk mencapai perubahan yang signifikan dalam mengatasi perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan. Perlu diperhatikan juga kesadaran, pendidikan, dan langkah-langkah hukum yang lebih kuat diperlukan untuk menghentikan praktik-praktik yang merugikan perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender yang lebih adil di India (Salamor and Salamor 2022).

Kekerasan dan ketidaksetaraan gender yang terjadi di India seperti kekerasan rumah tangga, baik secara fisik maupun psikologis, ketidakadilan di tempat kerja, pelecehan seksual, pemerkosaan, diskriminasi, bahkan perempuan dilihat sebagai objek properti yang mudah dimainkan oleh laki-laki. Perilaku ketidakadilan lainnya adalah seperti tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak, fasilitas kesehatan,

atau bahkan tidak diperbolehkan ikut campur dalam aktivitas politik (Setiya Farisca et al., n.d., 2023).

Perempuan di India dilihat sebagai istri dari kaum laki-laki, pada dasarnya hanya mengikuti perintah tanpa mencari keadilan hak hak yang setara dengan laki-laki dan membangun identitas yang bijaksana. Namun, hal ini terus berlanjut hingga saat ini dikarenakan status kasta maupun struktur sosial. Perempuan yang memiliki status sosial yang rendah akan semakin direndahkan bahkan hak hak dan identitasnya tidak diakui. Diskriminasi tersebut juga dipengaruhi oleh tradisi dan adat yang sudah mengakar dari zaman dahulu. Tentu hal ini bisa saja dihilangkan meskipun sangat sulit untuk merubah pemikiran mengenai sistem kasta dan status sosial (Paranthaman dkk. 2019).

Lingkungan dan campur tangan pemerintah sangat berpengaruh dalam menyetarakan hak hak perempuan yang ada di India. Pemuda dan generasi penerus harus memikirkan bagaimana masa depan dan keberlangsungan hidup perempuan di India, salah satunya adalah terus meningkatkan pendidikan agar tidak ada lagi ketimpangan yang menekan kaum kasta rendah. Kaum yang memiliki status rendah mendapatkan diskriminasi seperti bekerja di lingkungan yang kotor, bau, berbahaya bahkan mereka juga tidak diperbolehkan untuk sekolah (Apriani, 2015). Melalui pendidikan, hal tersebut dapat diatasi seiring dengan kesadaran masyarakat di India terhadap pentingnya kesadaran perempuan di India agar mewujudkan hidup yang aman dan tentram sebagai bentuk pencapaian hak hak dan kesetaraan gender.

Mereka kerap mendapatkan diskriminasi di luar publik yang mana hal tersebut dianggap lumrah oleh masyarakat sekitar, bahkan mirisnya banyak yang

menganggap hal tersebut adalah hal yang tidak perlu ditangani oleh pemerintah. Hal ini menjadi tantangan karena sulitnya mencari keadilan terhadap kasus ketimpangan pendidikan di India. Pada tahun 2014 hingga tahun 2024 Narendra Modi telah mengambil kebijakan untuk menyamakan hak dan ketimpangan yang terjadi di India dalam bidang pendidikan.

Pemerintah India terus meningkatkan program kerja dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan angka pertumbuhan pendidikan untuk mampu bersaing dengan dunia global dengan tujuan utama membantu manusia untuk meningkatkan kecerdasan intelektual. Selain itu pemerintah India juga bekerjasama dengan beberapa lembaga yang menangani dunia pendidikan seperti *Ministry of Education* (MoE), *National Council of Educational Research and Training* (NCERT), selain itu Narendra Modi juga meningkatkan kerjasama di ASEAN dengan program ASEAN-India *Network of Universities* (AINU) dengan lembaga utamanya yaitu Universitas Nalanda dengan program keunggulan seperti Teknik, Sains dan Teknologi, dengan pengembangan dan teknologi dari Asia-Pasifik di dunia multipolar (Lertnaikiat 2022).

Pemerintah India juga bekerja sama dengan berbagai organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yang dimana secara aktif membantu pemerintah India dalam menangani kasus yang terjadi. Terdapat organisasi dibawah naungan PBB seperti UN Women, UNICEF, *Conventions on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women* (CEDAW). Tujuan utama dari organisasi diatas tidak lain adalah karena untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan. Konvensi ini mencakup berbagai bidang,

termasuk hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, partisipasi politik, pendidikan, kesehatan, dan kekerasan terhadap (UN Women 2013).

Pada tahun 2014, Narendra Modi bertekad untuk mewujudkan sistem pendidikan yang layak dan terus berinovasi agar India bisa bersaing dengan negara lainnya dalam berbagai aspek terutama dalam aspek pendidikan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Narendra Modi berfokus pada peningkatan pentingnya pendidikan untuk seluruh rakyat tanpa memandang kasta, ras, maupun gender. Menurut laporan dari The World Economic Forum, terdapat 4 indeks yang diperhitungkan untuk melihat kemajuan negara yaitu *Economic Participation and Opportunity*, *Educational Attainment*, *Health and Survival*, and *Political Empowerment*. Pada laporan tersebut terutama pada tahun 2014, India tergolong rendah untuk bersaing dengan negara-negara lainnya. Dan pada tahun 2014 indeks pendidikan di India berada di posisi 126 di antara 142 negara lainnya (*The World Economic Forum* 2014).

Program Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) berperan penting dalam mengatasi ketimpangan gender karena hasil dari kebijakan tersebut akan memastikan bahwa anak perempuan memiliki kesempatan dan akses yang sama terhadap pendidikan di India. Skema yang diluncurkan pada 22 Januari 2015 dengan tujuan penyetaraan ketidaksetaraan gender, peningkatan pendaftaran sekolah anak perempuan, keberlangsungan perlindungan hidup perempuan. Skema ini telah menjadi salah satu program yang sangat jelas untuk mendukung hak-hak dan kesetaraan gender di India (Ministry of Women and Child Development 2025).

Dari uraian di atas, untuk mengatasi ketimpangan pendidikan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, penting bagi pemerintah untuk melakukan kampanye dan upaya pendidikan kepada masyarakat. Dengan melibatkan komunitas secara aktif, korban kekerasan dapat mencari perlindungan dan mendapatkan dukungan meskipun mengalami keterbatasan dalam melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Peran LSM dan lembaga perlindungan masyarakat juga sangat penting dalam mendukung upaya pemerintah dan memastikan implementasi kebijakan yang efektif.

Melalui kerja sama ini, pemerintah dapat memaksimalkan upaya mereka dalam mengatasi permasalahan ini. Alasan saya mengambil penelitian ini adalah untuk mengkaji kebijakan Narendra Modi selama masa kepemimpinannya dalam bidang pendidikan yang tergolong rendah dan semestinya patut untuk dikaji lebih dalam lagi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta kesadaran atas ketimpangan yang terjadi di India terutama kepada perempuan atau kaum minoritas serta melihat bagaimana Narendra Modi meningkatkan sistem pendidikan di India.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah proses implementasi kebijakan BBBP di bawah pemerintahan Narendra Modi dalam menangani ketimpangan pendidikan dan meningkatkan angka pertumbuhan pendidikan terhadap perempuan India pada tahun 2014-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam isu ketimpangan berbasis gender dalam bidang pendidikan di India, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi ketimpangan dan ketidakadilan dalam bidang pendidikan di India.
2. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui proses implementasi kebijakan BBBP yang dilakukan oleh Narendra Modi dalam mengatasi ketimpangan pendidikan kepada perempuan di India terutama pada tahun 2014 hingga 2024.
3. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai hasil kebijakan yang telah dilakukan atau direncanakan oleh Narendra Modi selama masa jabatannya serta mengevaluasi program BBBP.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini berfokus kepada pembahasan kebijakan Narendra Modi dalam mengatasi ketimpangan pendidikan terhadap perempuan di India pada tahun 2014 hingga 2024. Dalam penelitian ini ranah kebijakan yang diambil adalah kebijakan domestik yang sudah diimplementasikan yaitu kebijakan BBBP di India dan aktor yang terlibat di dalam penelitian ini yaitu Narendra Modi dan negara India sebagai indikator negara tujuan.

Tabel 1.1 Perbandingan Goblal Gender Gap Tahun 2014 dan 2024

Gender Gap	2014	2024
Overall	114	129

Economic Participation and Opportunity	134	142
Educational Attainment	126	112
Health and Survival	141	142
Political Empowerment	15	65

Sumber: *The World Economic Forum 2014-2024*

Tabel 1.1 menunjukkan perbandingan indeks Gender Gap antara tahun 2014 dan 2024 dalam berbagai kategori. Indeks ini digunakan untuk mengukur kesenjangan gender di berbagai aspek kehidupan, termasuk partisipasi ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan politik. Dalam tabel 1.1 perbandingan indeks Gender Gap di India pada tahun 2014 hingga 2024, dalam penelitian ini hanya memfokuskan dalam aspek pendidikan.

Penelitian ini diawali ketika Narendra Modi menjadi Perdana Menteri di India pada tahun 2014. Berdasarkan laporan dari *The World Economic Forum*, pada tahun 2014 pendidikan di India berada pada tingkat 126 diantara 142 negara lainnya sedangkan, pada tahun 2024 pendidikan di India berada pada tingkat 112. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan di India semakin meningkat dari tahun 2014 hingga tahun 2024.

Penelitian ini diakhiri pada tahun 2024 karena pertumbuhan pendidikan pada tahun tersebut cukup meningkat seperti perbandingan index pada tabel 1.1. Hal ini dapat melihat proses implementasi kebijakan BBBP selama Narendra Modi menjabat sebagai pemerintah India dalam menangani ketimpangan pendidikan terhadap perempuan di India.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tujuan utama dari penelitian ini adalah analisis kebijakan Narendra Modi yang diimplementasikan dalam politik domestik India pada tahun 2014 hingga 2024. Dalam upaya mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan, Program Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) yang diluncurkan pada tahun 2015 oleh Pemerintahan Narendra Modi menjadi salah satu kebijakan strategis yang sangat penting. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk mengkaji berbagai literatur yang relevan mengenai proses implementasi kebijakan, serta dampak dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program BBBP selama periode 2014-2024. Setelah peneliti membaca lebih dalam terhadap penelitian yang akan dikaji, ada beberapa penelitian yang hampir sama dengan kajian yang peneliti lakukan namun juga akan memberikan perbedaan terhadap penelitian terdahulu.

Dalam jurnal pertama yang berjudul “*India Government Policies in Handling Gender-Based Violence against Women during the COVID-19 Pandemic: A Feminist Perspective*” yang ditulis oleh Yoana Septiani Setiya Ferisca, Ningsih Susilawati , Ida Bagus Putu Aditya , dan Indra Krishnamurti. Jurnal tersebut membahas kebijakan pemerintah India dan kekerasan yang terjadi namun dengan rentang waktu yaitu selama Covid-19. Pada jurnal tersebut juga membahas mengenai faktor faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan gender terhadap perempuan. Hasil dan pembahasan yang dalam jurnal tersebut mengungkapkan bahwa pemerintah India terkesan lambat dalam memperhatikan kasus kekerasan terhadap gender kepada perempuan di India. Namun, jurnal ini

belum menjelaskan secara spesifik mengenai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah India dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan India.

Dalam jurnal kedua yang berjudul “Tantangan Budaya dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di India dan Solusinya” yang ditulis oleh Agneta Kristalia Tedjo, Mohammad Daffa Ramadhan, Muhammad Daffa Dirgantara, dan Raden Arief Meivio Bahari menjelaskan secara detail mengenai faktor kebudayaan patriarki yang menjadi penyebab utama dari adanya kekerasan berbasis gender yang terjadi di India. Dalam jurnal tersebut peneliti terdahulu juga menuliskan solusi terhadap konflik yang terjadi seperti dukungan dari berbagai pihak dalam mengatasi konflik tersebut seperti pemerintah dan organisasi yang turut membantu mewujudkan kesetaraan gender di India. Namun, di dalam jurnal tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai kebijakan terbaru maupun studi kasus yang baru terjadi, sehingga peneliti akan membahas mengenai kebijakan serta studi kasus terbaru untuk menjadikan pembeda antara peneliti dengan peneliti terdahulu.

Dalam jurnal yang ketiga yang berjudul “Keamanan Manusia dalam Pengaruh Tradisi Dowry di India terhadap Kekerasan Berbasis Gender di India” yang dikaji oleh Nining Kurnia, Khairur Rizki, Zulkarnain. Dijelaskan di dalam jurnal tersebut menggunakan dua perspektif yaitu feminisme dan human security yang dimana hampir memiliki kesamaan terhadap dua pandangan tersebut. Selain itu peneliti terdahulu juga menjelaskan dampak dari kekerasan yang terjadi di India secara menyeluruh. Analisis keamanan manusia menjadi fokus utama dalam kajian peneliti terdahulu sehingga hal ini menjadi pembeda antara peneliti terdahulu dengan kajian yang akan peneliti lakukan. Terdapat kesamaan dalam penulisan kajian

dengan peneliti terdahulu yaitu kurangnya rasa aman yang dirasakan oleh korban dikarenakan menjadi ancaman tersendiri untuk mengungkapkan kekerasan yang terjadi kepada perempuan di India.

Dalam jurnal terakhir yang berjudul “*Violence against Indian Dalit Women under Narendra Modi Government: Johan Galtung’s Cultural Violence Analysis*” yang ditulis oleh Santria Agusti & Karina Utami Dewi mengkaji dan membahas mengenai kekerasan yang dialami oleh perempuan Dalit di India dibawah pemerintahan Narendra modi dengan menggunakan teori Johan Galtung untuk memperkuat pembahasan yang dikaji dalam penelitian tersebut. Terdapat persamaan dengan peneliti terdahulu yaitu seperti aktor yang terlibat yaitu Narendra Modi, namun juga terdapat perbedaan yaitu fokus utama kebijakan oleh Narendra Modi dalam menghadapi ketimpangan gender di India.

Dalam menyusun kajian yang akan peneliti lakukan membutuhkan sumber yang dapat dijadikan referensi untuk memulai penelitian seperti beberapa buku, jurnal, artikel, ataupun data tambahan mengenai kajian yang akan dibahas lebih lanjut. Peneliti menyadari adanya kesamaan dan perbedaan yang sudah dikaji oleh peneliti terdahulu. Adapun persamaan yang ditemukan pada penelitian terdahulu yaitu seperti aktor yang terlibat dalam pengambilan kebijakan dalam menyelesaikan kasus ketimpangan gender yang terjadi di India yang dirasakan oleh perempuan di India. Namun juga terdapat perbedaan yang akan menjadi pembeda antara peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu seperti perbandingan kebijakan yang dilakukan oleh Narendra Modi selama masa menjabat sebagai menteri India dan cakupan tahun yang lebih terbaru dibandingkan dengan peneliti terdahulu.

1.6 Kerangka Pemikiran

Terdapat kerangka pemikiran untuk membantu menganalisis penelitian terkait ketimpangan gender dalam pendidikan bagi perempuan di India. Teori yang dituliskan oleh Thomas B. Smith dengan judul "*The Policy Implementation Process*" adalah salah satu teori yang membantu untuk menentukan implementasi kebijakan dari pemangku kepentingan, organisasi, maupun lembaga lembaga internasional. Teori ini menjelaskan bahwa negara negara dunia ketiga sering kali gagal dalam melaksanakan suatu kebijakan, hal tersebut dikarenakan kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kondisi sosial dan tidak memiliki kapasitas untuk mengimplementasikannya (Smith 1973, 198).

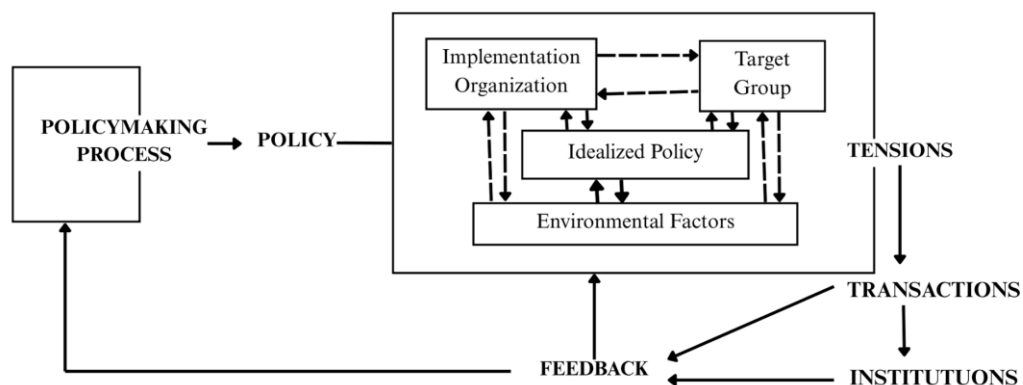
Dalam teori ini berfokus kepada "input" maupun proses pembuatan kebijakan, sering kali negara negara ketiga gagal untuk menerapkan kebijakan yang ideal, disebabkan oleh penekanan terhadap pemangku kepentingan seperti pemerintah, tanpa melibatkan penerima manfaat kebijakan tersebut, sehingga kebijakan yang telah dibuat tidak bermanfaat bagi penerima dampak kebijakan tersebut. Selain itu faktor kegagalan lainnya yaitu lemahnya sumber daya manusia, pemimpin dan politik yang tidak sejalan, penentangan kebijakan yang dibuat, korupsi, dan lainnya (Smith 1973, 199).

Pengambilan kebijakan dalam negara negara ketiga sering kali mengabaikan perubahan perubahan kecil, sehingga kebijakan yang dibuat tidak menggunakan tahapan dan bersifat ambisius. Jika di negara negara barat, mereka cenderung membuat kebijakan inkremental karena jauh lebih mudah untuk diimplementasikan meskipun tetap memiliki tantangan tersendiri untuk menjalankan kebijakan tersebut. Kebijakan di negara negara ketiga sering kali terlihat sama dengan kebijakan sebelumnya yang

disebabkan karena kurangnya interaksi langsung antara pemerintah dan penerima kebijakan.

Proses kebijakan dalam negara ketiga adalah salah satu komponen penting untuk mencapai kebijakan yang ideal, sehingga kebijakan tersebut memerlukan pandangan dari penerima manfaat, maupun masyarakat untuk mengevaluasi kebijakan sebelumnya agar tidak mengulangi kesalahan dalam proses pengambilan kebijakan yang baru (Smith 1973, 200).

Gambar 1.6 Proses Implementasi Kebijakan



Sumber: Smith 1973, 203.

Menurut Thomas B. Smith, terdapat 4 komponen penting dalam proses implementasi kebijakan yaitu:

1. *The Idealized Policy* (Kebijakan yang diidealkan)

Kebijakan yang diidealkan adalah kebijakan yang diambil oleh pemangku kebijakan dalam menangani masalah maupun isu dalam kondisi suatu negara tersebut. Kebijakan yang dibuat meliputi kebijakan sederhana,

kebijakan organisasi maupun non-organisasi, dan kebijakan distributif, dll (Smith 1973, 204).

2. *The Target Group* (Kelompok Sasaran)

Adalah orang-orang yang menerima dampak kebijakan yang dibuat, yaitu seperti masyarakat, anak-anak, perempuan, maupun kaum kasta rendah. Kelompok sasaran melihat kebijakan serta merespons kebijakan tersebut dengan menerima maupun menentang adanya kebijakan yang diambil oleh pemangku kebijakan (Smith 1973, 204).

3. *The Implementing Organization* (Organisasi Pelaksana)

Adalah organisasi pelaksana yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan. Dalam berbagai contoh, biasanya terdiri atas organisasi dari NGO (Non-Governmental Organization). Untuk organisasi pelaksana juga memerlukan beberapa variabel penting seperti kestabilan kepemimpinan, intensitas terhadap kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah, dan kapasitas umum organisasi untuk memenuhi tujuan dari kebijakan tersebut (Smith 1973, 205).

4. *Environmental Factors* (Faktor Lingkungan)

Adalah faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa kebijakan tersebut dikeluarkan dan diimplementasikan. Contohnya faktor budaya, adat, sosial, ekonomi dan politik (Smith 1973, 205).

Setelah mengidentifikasi komponen utama dari proses implementasi, tahapan selanjutnya adalah proses dari implementasi kebijakan. Menurut Smith, terdapat empat

proses yang perlu dilakukan oleh pemangku kebijakan untuk mencapai kebijakan yang diidealkan yaitu:

1. *Tensions*

Setelah mengidentifikasi komponen utama diatas, maka proses implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan melihat ketegangan maupun isu yang terjadi. Ketegangan dapat terjadi dari berbagai kelompok maupun individu. Biasanya ketegangan banyak terjadi dalam proses pengambilan keputusan, seperti perbedaan antara situasi aktual dan situasi yang diharapkan (Smith 1973, 205).

2. *Transactions*

Transactions adalah pendekatan yang dilakukan oleh organisasi pelaksana untuk menjembatani implementasi kebijakan dari pemangku kepentingan. Organisasi pelaksana memberikan pendekatan berupa program program yang sejalan dengan pemerintah. Kemampuan pendekatan dari organisasi pelaksana juga menjadi penentu dari berhasilnya proses implementasi kebijakan, sehingga dapat dibuktikan melalui umpan balik dari kelompok sasaran (Smith 1973, 207).

3. *Institutions*

Institutions diukur melalui kemampuan lembaga untuk bertahan di lingkungan maupun wilayah tersebut, dan kebijakan tersebut dapat dipandang baik oleh masyarakat dalam proses implementasi kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan menjadi tekanan penting agar membentuk lembaga yang administratif untuk mencapai hasil kebijakan yang

diharapkan. *Institutions* akan dihasilkan jika dilihat dari *Idealized Policy* dan dibandingkan dengan hasil aktual dari proses implementasi kebijakan (Smith 1973, 208)

4. *Feedback*

Merupakan respon dari kelompok sasaran mengenai proses implementasi yang telah dijalankan. Hasil respon dari kelompok sasaran dapat berupa menerima maupun menolak kebijakan (Smith 1973, 209).

1.7 Argumen Sementara

Implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemangku kebijakan dapat dianalisis melalui teori yang dipaparkan oleh Thomas B. Smith dengan judul “*The Policy Implementation Process*”. Agar kebijakan tersebut mempunyai dampak dan manfaat kepada masyarakat, maka para analis harus memperhatikan 4 komponen utama dalam proses implementasi kebijakan yang dipaparkan oleh Smith yaitu kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan. Untuk itu perlu adanya beberapa tahapan dalam proses implementasi kebijakan yaitu seperti penyaluran kebijakan melalui NGO dan umpan balik dari masyarakat maupun penerima kebijakan.

Kebijakan yang diidealkan tentu saja melihat dari bagaimana kondisi dan isu yang terjadi di India, setelah mengidentifikasi apa saja isu yang terjadi, tentu harus mendapatkan solusi dan kebijakan yang tepat. Di India, terdapat banyak anak dan perempuan yang putus sekolah yang disebabkan oleh berbagai faktor. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu menangani kasus ketimpangan pendidikan yang terjadi,

dengan tujuan tidak ada lagi anak-anak dan perempuan yang memutuskan untuk tidak bersekolah.

Kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan yaitu anak-anak dan perempuan terutama bagi usia dini dan sekolah menengah keatas. Dari laporan Open Government India tahun 2018-19, tingkat putus sekolah perempuan di tingkat sekolah menengah yaitu 17,1%. Hal ini menjadi sasaran kebijakan dan penerima manfaat dari kebijakan yang diidealkan. Kebijakan yang diidealkan yaitu berupa *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) dengan tujuan lebih berfokus kepada pendidikan perempuan.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan, dan kementerian pemberdayaan anak dan perempuan, bertanggung jawab dalam menangani isu yang terjadi. Namun, kementerian tersebut tidaklah bergerak sendiri, tetapi juga terdapat bantuan dari NGO di India seperti *Nanhi Kali* dan *Educate Girls* yang berfokus terhadap pendidikan dan pemberdayaan perempuan di India. Kurangnya pendidikan di India disebabkan karena beberapa faktor lingkungan seperti struktur sosial, budaya patriarki, ketimpangan gender, dan ekonomi.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimana penerapannya bersumber dari bahan kepustakaan sehingga nantinya menjadi deskriptif yang berdasarkan analisis. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penulis akan menyusun secara struktural penelitian yang akan dikaji.

Selain itu, landasan teori yang sudah ditulis pada bagian “kerangka pemikiran” akan menjadi bahan penguat penulis dalam mengkaji penelitian.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Narendra Modi sedangkan objek penelitian ini adalah proses implementasi kebijakan BBBP oleh Narendra Modi dalam menangani konflik ketimpangan pendidikan terhadap perempuan di India selama periode 2014-2024.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data pustaka dengan mengkaji jurnal, artikel, laporan, dan sumber-sumber lain yang membahas isu ketimpangan pendidikan terhadap perempuan di India serta mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen resmi pemerintah India terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatasi ketimpangan pendidikan terhadap perempuan di India selama periode 2014-2024.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan teknik analisa yang berbasis analisis dengan konsep struktural dengan sumber referensi yang dapat dipercaya terkait dengan isu ketimpangan gender terhadap perempuan di India.

1.9 Sistematika Pembahasan

BAB 1 Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka

pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB 2 Bab ini menjelaskan mengenai *Idealized Policy, Target Group, Implementation Organization, Environmental Factors*.

BAB 3 Bab ini akan menjelaskan mengenai *Tensions, Transactions, Insitutions, Feedback*.

BAB 4 Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dan rekomendasi terhadap penelitian yang dikaji serta sebagai penutup penelitian.

BAB 2

EMPAT KOMPONEN UTAMA DALAM PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Kebijakan menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Proses ini tidak hanya melibatkan penyusunan kebijakan yang ideal, tetapi juga memerlukan pemahaman mendalam mengenai berbagai komponen yang berperan dalam keberhasilan implementasi tersebut. Bab ini akan membahas empat komponen utama yang menjadi pondasi dalam proses implementasi kebijakan, yaitu *Idealized Policy, Target Group, Implementation Organization, Environmental Factors*.

2.1 *Idealized Policy*

Kebijakan yang diidealkan adalah gambaran dan rencana tentang bagaimana kebijakan tersebut berjalan dengan baik serta mencapai tujuan seperti yang diharapkan oleh pemangku kebijakan. Kebijakan yang diidealkan adalah pola interaksi yang diinginkan oleh berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, organisasi lain untuk mencapai hasil yang positif. Pemangku kebijakan mempunyai harapan besar dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut menjadi kebijakan yang ideal. Terdapat tiga kategori kebijakan yaitu (Smith 1973, 203):

1. Kebijakan yang kompleks dan sederhana

Kebijakan yang kompleks adalah kebijakan yang luas dan tidak memiliki tahapan tahapan kecil. Negara negara dunia ketiga sering kali mengimplementasikan kebijakan yang kompleks agar kebijakan tersebut menjadi kebijakan yang mempunyai skala besar untuk jangka waktu yang lama.

2. Kebijakan dapat dikategorikan sebagai kebijakan organisasi atau non-organisasi

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seringkali memerlukan pembentukan organisasi formal. Sebagai contoh terdapat kebijakan yang membutuhkan pembentukan organisasi formal di beberapa bagian, namun untuk kebijakan non-organisasi berfokus kepada kelompok interaksi diluar konteks organisasi tanpa harus terikat pada aturan formal dari pemerintah maupun organisasi.

3. Kebijakan yang diklasifikasikan sebagai distributif, re-distributif, pengaturan, atau emotif-simbolik.

Dalam proses implementasi kebijakan, komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi adalah salah satu hal yang penting. Komunikasi ini nantinya akan menjadi penentu apakah kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diidealkan. Koordinasi antara semua komponen membantu untuk menjalankan proses implementasi kebijakan. Jika koordinasi antara komponen tersebut berjalan dengan lancar, maka akan semakin mengurangi kesalahpahaman dalam implementasi kebijakan tersebut.

Dalam penelitian ini, kebijakan yang diimplementasikan oleh pemangku kebijakan yaitu Narendra Modi sebagai Perdana Menteri India adalah kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP). Narendra Modi juga bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan & Kesejahteraan Keluarga, dan Kementerian Pendidikan, dengan tujuan kesetaraan

gender, pendidikan anak perempuan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan (Ministry of Women and Child Development, 2025).

Kebijakan BBBP dikeluarkan pada tahun 2015 telah berjalan seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah terus meningkatkan program program untuk membantu perlindungan dan pendidikan anak perempuan di India. Dikutip dari laporan Kementerian Pemberdayaan Anak dan Perempuan tahun 2019, komunikasi yang dilakukan oleh pemangku kebijakan yaitu seperti:

1. Melaksanakan kampanye advokasi media massa dengan mempromosikan setiap kebijakan dan program yang berkaitan dengan skema BBBP. Promosi dari media massa menyampaikan mengenai pendidikan perempuan tanpa adanya diskriminasi agar menjadi negara berdaya dengan hak yang setara. Penyebaran informasi disebarkan melalui radio, televisi, youtube yang berbahasa Hindi dan Bahasa Daerah. Platform media sosial yang digunakan seperti facebook, Vikaspedia, Website of Ministry of Women and Child Development, dll.
2. Memprioritaskan isu Child Sex Ratio (CSR) di berbagai kabupaten dan kota yang memiliki CSR rendah, dan berfokus kepada aksi kebijakan disertai kerjasama dengan berbagai sektor kementerian seperti Ministry of Health and Family Welfare, dan Ministry of Human Resource Development.
3. Memperkuat kapasitas lembaga pemerintahan dan NGO serta bekerjasama dengan masyarakat, perempuan, dan remaja sebagai penguatan perubahan sosial.

4. Memfasilitasi struktur dan program dalam penyampaian isu gender dan hak anak.
5. Memfasilitasi teknologi maupun media antara institusi di berbagai daerah.

Dengan adanya program BBBP dan berbagai strategi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah India, diharapkan kebijakan BBBP dapat memperbaiki isu yang sedang terjadi di India terutama dalam sektor pendidikan anak perempuan. Pemerintah mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dan berkontribusi secara efektif, implementasi kebijakan dalam program BBBP juga didukung oleh beberapa lembaga yang membahas isu perempuan dan kesetaraan gender di India.

2.2 Target Group

Komponen penting selanjutnya adalah kelompok sasaran, yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menerima manfaat dari kebijakan yang diimplementasikan. Dalam teori Smith, ada beberapa faktor yang relevan dengan kelompok sasaran yaitu (Smith 1973, 204) :

1. Tingkat Organisasi atau Pelembagaan Kelompok Sasaran

Organisasi yang mendukung isu yang relevan dengan implementasi kebijakan akan membantu pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan kebijakan yang ideal. Tingkat organisasi maupun pelembagaan kelompok sasaran sangat penting untuk mewakili bagaimana umpan balik dari masyarakat kepada pemangku kebijakan.

2. Kepemimpinan dari Kelompok Sasaran

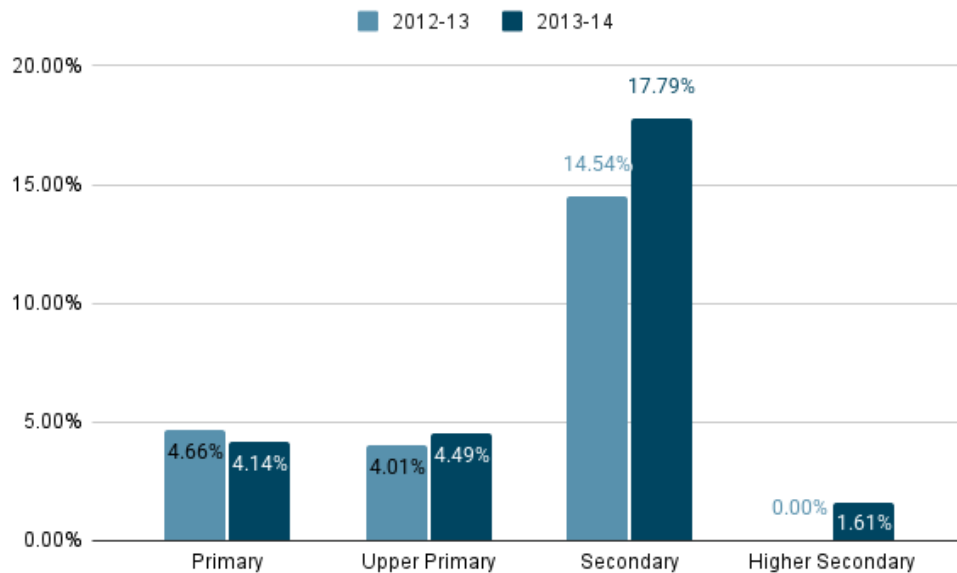
Untuk menerima maupun menolak kebijakan yang diimplementasikan dapat diwakilkan oleh salah satu dari kelompok sasaran. Kepemimpinan dari sebuah kelompok sasaran harus beradaptasi dengan kebijakan yang diimplementasikan agar menyampaikan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemangku kepentingan kepada anggota kelompok sasaran. Hal ini berguna untuk meningkatkan implementasi kebijakan agar kebijakan tersebut dapat diterima oleh kelompok sasaran.

3. Pengalaman Kebijakan Sebelumnya dari Kelompok sasaran

Apakah kelompok sasaran dari implementasi kebijakan merasakan dampak dan manfaat dari kebijakan yang telah dibuat, baik dari kebijakan baru maupun kebijakan lama. Analis dapat menilai dan menganalisis apakah respon mereka terhadap kebijakan pemerintah seperti apakah mereka mematuhi, memberontak, atau tidak peduli?

Pada tahun 2019 kebijakan BBBP dikeluarkan oleh Narendra Modi dengan tujuan “Selamatkan Anak Perempuan, Didik Anak Perempuan” dengan tujuan mendorong pendidikan perempuan di India dan menghindari diskriminasi terhadap perempuan lainnya. Program BBBP diluncurkan karena CSR yang menurun di berbagai daerah, di mana terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Banyak anak-anak dari usia 14 hingga 18 tahun tidak melanjutkan pendidikan, yang disebabkan oleh struktur sosial, budaya, dan ekonomi.

Gambar 2.1 Rata-Rata Angka Putus Sekolah Perempuan Tahun 2012- 2014



Sumber: Laporan OGD INDIA (2012-2014)

Dalam penelitian ini, kelompok sasaran ditujukan kepada anak-anak perempuan dengan tingkatan pendidikan *Primary*, *Upper Primary*, *Secondary*, dan *Higher Secondary*. Usia rata-rata diperkirakan yaitu dari 6 hingga 18 tahun. Dari laporan Over Government Data India melalui deret waktu pada tahun 2012 hingga 2014 tingkat angka putus sekolah anak perempuan pada tahun 2012-13 pada sekolah dasar yaitu sebesar 4.66%, dan pada tahun 2013-14 angka putus sekolah pada sekolah menengah terbilang cukup tinggi yaitu sebesar 17.79%. Dengan melihat kondisi pada tahun 2013-2014, Narendra Modi mencoba untuk mengeluarkan program program untuk mengatasi diskriminasi gender dan pemberdayaan perempuan di India. Dengan melihat kondisi pendidikan anak perempuan seperti yang digambarkan pada tabel 2.1, yang terjadi di India pada tahun 2012-13 Narendra Modi harus mengeluarkan dan

meramalkan kebijakan untuk meningkatkan pendidikan dan partisipasi anak perempuan serta mengatasi ketimpangan gender terhadap perempuan di India.

Rendahnya angka pendidikan dan literasi di India menjadi salah satu permasalahan yang cukup serius, kurangnya pendidikan akan mengakibatkan beberapa dampak lainnya seperti kesejahteraan hidup, kemiskinan, masalah kesehatan dan meningkatnya angka kekerasan dan ketidaksetaraan gender di India. Anak perempuan di India cenderung lebih memilih untuk menikah di usia dini dan menjadi pekerja anak di usia yang seharusnya ditempuh untuk pendidikan. Bahkan tercatat tingkat literasi di India bagi perempuan hanyalah 62,3% dibandingkan dengan laki-laki yaitu sebesar 80% (Jenna Cook 2025).

Sebagai kelompok sasaran, anak perempuan harus memahami dan menerima kebijakan yang dilakukan melalui sosialisasi maupun kampanye yang melibatkan peran masyarakat lainnya. Kepatuhan dari penerima manfaat juga menjadi faktor dari keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga akan memudahkan pemerintah untuk menindaklanjuti isu terkait diskriminasi dan ketimpangan pendidikan di India.

2.3 *Implementation Organization*

Organisasi pelaksana adalah komponen ketiga yang diperlukan dalam proses implementasi kebijakan. Organisasi pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan. Organisasi pelaksana dapat berupa organisasi pemerintahan maupun organisasi non pemerintahan. Dalam membantu proses implementasi kebijakan, organisasi pelaksana mempunyai peran penting untuk menjembatani implementasi kebijakan kepada kelompok sasaran.

Organisasi pelaksana mempunyai peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dengan cara bekerjasama dan berkoordinasi dengan pemangku kebijakan. Melalui organisasi pelaksana, masyarakat dapat memberikan aspirasinya kepada pemangku kebijakan, sehingga kebijakan dapat dievaluasi dan memberikan umpan balik kepada pemangku kebijakan untuk perbaikan di masa depan. Dalam pendekatan kepada kelompok sasaran, organisasi pelaksana dapat melakukan berbagai strategi untuk menyampaikan implementasi kebijakan, sehingga tidak adanya kesalahpahaman terhadap pemangku kebijakan.

Menurut Smith, terdapat tiga variabel yang dipertimbangkan dalam implementasi kebijakan (Smith 1973, 204–5) :

1. Struktur Organisasi dan Personil dalam Implementasi Kebijakan

Struktur organisasi merujuk kepada cara bekerja organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dalam konteks implementasi kebijakan, struktur yang jelas dan terarah dengan baik akan menentukan hasil implementasi dan pendekatan kepada masyarakat maupun kelompok sasaran. Orang-orang yang terdapat di dalam organisasi pelaksana, harus memahami lebih dalam mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemangku kebijakan. Organisasi yang tidak terstruktur, tidak stabil, dan mempunyai sumber daya manusia yang tidak memenuhi syarat, dapat mengurangi kapasitas untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut (Smith 1973, 205).

2. Kepemimpinan dalam Organisasi Administratif

Pemimpin organisasi pelaksana maupun pemimpin kelompok sasaran, mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menyampaikan implementasi

kebijakan dan aspirasi kelompok sasaran lainnya. Sehingga, diperlukan kepemimpinan yang bijaksana dalam menangani isu yang terjadi di kelompok sasaran. Pemimpin harus memiliki interpersonal yang kuat seperti komunikasi, empati, dan kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dengan tim maupun kelompok sasaran (Smith 1973, 205).

3. Program dan Kapasitas Organisasi Pelaksana

Program dan pendekatan yang diberikan oleh organisasi pelaksana, mengacu kepada intensitas yang diberikan untuk mengatur pelaksanaan dan kapasitas umum organisasi untuk memenuhi tujuan pelaksanaan program. Jika organisasi tersebut sudah berkembang dan terstruktur, maka program yang diberikan akan semakin banyak dan bermutu, sehingga kapasitas untuk membuat program yang lebih baik akan semakin meningkat (Smith 1973, 205).

Dalam menangani isu ketidaksetaraan gender dan ketimpangan pendidikan untuk anak perempuan, beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non-Governmental Organization (NGO) yang membahas isu mengenai gender dan pendidikan, mempunyai peran penting untuk memperjuangkan hak anak-anak perempuan dengan memberikan layanan sosial atau melakukan advokasi terhadap isu yang bersangkutan. Di India, terdapat beberapa LSM yang berkaitan dengan gender dan perempuan diantaranya yaitu:

1. Nanhi Kali

Adalah salah satu lembaga organisasi non pemerintahan yang mendukung anak perempuan untuk melanjutkan pendidikannya. Organisasi Nanhi Kali didirikan pada tahun 1996 oleh Anand Mahindra dengan tujuan mendidik anak

perempuan yang kurang mampu. Isu sosial seperti budaya patriarki, tingkat literasi perempuan yang rendah, menjadikan latar belakang dari berdirinya Nanhi Kali. Selama bertahun-tahun, program Nanhi Kali telah menjangkau 870.000 perempuan kurang mampu di India (Nanhi Kali).

2. *Educate Girls*

Adalah lembaga yang berfokus terhadap mobilisasi masyarakat untuk pendidikan anak perempuan di daerah perdesaan dan sulit terjangkau di India. Educated Girls didirikan oleh Safeena Husain pada tahun 2007, dengan memanfaatkan investasi pemerintahan untuk menjembatani kesenjangan gender dalam pendidikan. Sasaran utama dalam Educate Girls yaitu anak perempuan dari umur 6-14 tahun. Organisasi Educate Girls berjalan sesuai dengan kebijakan pemerintah seperti National Education Policy (NEP) untuk mengakses pendidikan bagi semua pelajar, terutama anak perempuan dan perempuan lainnya. Educate Girls bekerjasama dengan pemerintah seperti mendaftarkan anak perempuan yang putus sekolah dan meningkatkan literasi dan numerasi anak perempuan (Educate Girls).

3. *Child Right and You (CRY)*

Cry adalah salah satu organisasi yang bergerak dalam bidang gender dan pendidikan. CRY memastikan bahwa setiap anak memiliki pendidikan tanpa terhalang gender, kasta, maupun status sosial ekonomi. CRY didirikan oleh Rippan Kapur dan enam orang temannya pada tahun 1979. CRY berkolaborasi dengan pemerintah untuk mempengaruhi kebijakan publik dengan landasan hukum yang ditetapkan oleh Undang Undang Hak atas Pendidikan (2009) dan

NEP 2020. Fokus utama organisasi adalah meningkatkan pendaftaran anak-anak disekolah, kampanye kesadaran masyarakat mengenai pendaftaran ulang siswa putus sekolah, dan memastikan hak anak-anak dalam mengakses pendidikan (Child Right and You 2020).

Dari organisasi di atas, tujuan dan fokus utama dalam menjembatani implementasi kebijakan pemerintah yaitu berfokus kepada pendidikan anak-anak perempuan agar mereka mendapatkan hak yang setara tanpa adanya diskriminasi gender di lingkungan pendidikan. Organisasi pelaksana membantu pemerintah dan kelompok sasaran untuk saling terhubung. Organisasi pelaksana harus memenuhi syarat dan kapasitas sebagai organisasi yang bertanggung jawab agar pemahaman implementasi kebijakan mudah dipahami dan dapat menyebar ke seluruh kelompok sasaran.

2.4 *Environmental Factors*

Kelompok sasaran adalah mereka yang menerima dampak dan manfaat dari kebijakan yang diidealkan serta, mereka yang diharuskan untuk beradaptasi dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Smith 1973, 204). Pendidikan terhadap anak-anak perempuan di India sangat penting untuk memajukan tingkat sumber daya manusia dalam menghadapi dunia yang lebih universal. Komponen utama dalam pembangunan nasional dan kesetaraan gender berkaitan erat dengan tingkat pendidikan sehingga, lingkungan menjadi alasan kuat dalam mendorong pendidikan yang berkualitas. Jika faktor lingkungan tidak memadai, maka akan banyak tantangan dan hambatan masyarakat untuk menempuh pendidikan. Kebutuhan pendidikan di India

menjadi peran penting untuk memutus dampak buruk seperti kemiskinan, diskriminasi, pengaruh budaya dan adat, dan struktur sosial (Hussain dan K., 2024).

2.4.1 Hambatan Budaya

Dalam beberapa kasus, perempuan di India menjadi tanggung jawab dari adanya budaya yang sudah ada mengakar dari zaman dahulu. Akibatnya, hal ini berdampak hingga saat ini dan kesempatan pendidikan menjadi terbatas bagi perempuan. Dengan adanya keterbatasan tersebut, maka muncul beberapa dampak buruk seperti kutukan, penghinaan, sumber nafsu dan kesengsaraan. Namun, dengan adanya tradisi budaya yang diperbaharui, perempuan di India tidak mendapatkan haknya sebagai umat manusia (Rana, 2023).

Pernikahan dini adalah salah satu dari berbagai faktor pendorong pendidikan di India cukup rendah, banyaknya anak-anak usia dari 17,4 tahun hingga 19 tahun yang mengalami pernikahan dini (Kanji dkk. 2024). Mereka bertanggung jawab atas persoalan rumah tangga tanpa adanya pendidikan yang cukup dan hal tersebut saling ketergantungan dengan kemiskinan, dan kekerasan, dan ketertindasan gender.

Di India terdapat struktur sosial seperti kasta dan kelas, persaingan antara keduanya menjadi hambatan tambahan bagi perempuan untuk mengakses pendidikan, terutama bagi mereka yang kurang memadai dalam aspek ekonomi, dan dari kasta seperti Scheduled Castes (SC) adalah kelompok yang secara historis mengalami diskriminasi berdasarkan sistem kasta, dan Scheduled Tribes (ST) merujuk pada kelompok etnis yang memiliki budaya dan tradisi unik, sering kali tinggal di daerah terpencil (Kishor 2022). Seperti kelompok perempuan Dalit yang sulit mendapatkan

akses pendidikan, anak-anak Dalit diperlakukan tidak adil dan dipisahkan dengan siswa lainnya. Tak hanya itu, banyak guru yang juga tidak memberikan perhatian yang sama kepada siswa Dalit. Hal tersebut menyebabkan motivasi yang rendah dalam pendidikan dan peningkatan angka putus sekolah (Pradhan, 2021).

Di berbagai wilayah di India, peran gender tradisional menjadi harapan masyarakat kepada perempuan untuk mengikuti kebudayaan dan adat. Norma norma adat yang mengakar menjadi prioritas dalam kehidupan perempuan di India, sehingga mereka lebih mengutamakan pernikahan dini dibandingkan pendidikan untuk anak perempuan. isu pernikahan dini menjadi masalah kritis yang berdampak langsung terhadap pendidikan anak perempuan karena membatasi pendidikan (Thakur, 2024).

2.4.2 Tantangan Ekonomi

Kemiskinan menjadi faktor pendukung yang tidak bisa diabaikan karena menjadi hambatan dalam melanjutkan pendidikan. 1,21 miliar orang hidup di bawah garis kemiskinan di India (Roy 2018, 331). Banyak keluarga di India yang kurang beruntung dalam kebutuhan ekonomi. Mereka akan lebih memilih untuk putus sekolah dan terpaksa menjadi pekerja dengan upah yang rendah. Orang tua lebih memilih untuk menyekolahkan anak laki-laki dibandingkan perempuan, karena dianggap beban ekonomi, Hal ini menyoroti kurangnya pendidikan bagi anak perempuan dan bagaimana kemiskinan menjadi faktor penting dalam penurunan angka pendidikan di India (Hussain dan K. 2024).

Ekonomi yang buruk juga disebabkan oleh beberapa hal seperti mata pencarian yang kurang memadai seperti buruknya hasil pertanian. Kekurangan dalam sektor

ekonomi pada dasarnya berdampak kepada beberapa sektor lainnya. Jika ekonomi dalam fase yang kurang beruntung, maka akan timbul permasalahan seperti pembahasan mengenai biaya pendidikan. Kebutuhan yang diperlukan seperti alat tulis, buku, seragam, dan biaya selama masa pendidikan.

2.4.3 Fasilitas yang kurang memadai

Dalam mengakses pendidikan di India, infrastruktur yang kurang memadai menjadikan alasan banyaknya anak-anak yang putus sekolah. Dalam beberapa kasus di India, sekolah yang digunakan tidak memiliki kelas yang memadai untuk proses belajar mengajar, sehingga aktivitas pembelajaran juga tidak efektif bagi anak perempuan maupun laki-laki. Sekolah yang kurang memadai seperti penyediaan air bersih, fasilitas kebersihan pribadi dan kesehatan, menjadikan sekolah tidak menarik bagi siswa (Yadav, 2023).

Permasalahan infrastruktur juga banyak disalahgunakan oleh warga setempat, sekolah dan ruang kelas banyak digunakan untuk acara kepentingan pribadi seperti pengadaan acara pernikahan. Fasilitas di berbagai sekolah juga dirusak oleh penduduk setempat seperti merusak pintu dan beberapa alat perlengkapan sekolah. Sehingga hal ini menjadikan rasa keamanan dan kenyamanan untuk bersekolah tidak aman dan mengganggu aktivitas belajar mengajar. kurangnya komunikasi antara pihak sekolah dan pemerintah menimbulkan permasalahan yang kompleks (Sahu dkk. 2020).

Kualitas dan kurikulum yang kuno juga menghambat pendidikan di India, banyak guru yang belum menguasai cara mengajar yang sesuai dengan situasi yang terjadi. Suasana yang diciptakan sering kali membuat para siswa bosan sehingga

memutuskan untuk tidak bersekolah lagi. Dalam waktu yang bersamaan, kurangnya guru perempuan juga membuat anak-anak perempuan merasa tidak aman dan tidak ada pendekatan yang mendalam untuk membimbing anak-anak perempuan dibawah tekanan norma sosial yang kurang baik (Mishra, 2025).

Di berbagai sekolah, permasalahan toilet umum yang menggabungkan toilet antara laki-laki dan perempuan menjadi pemicu utama dalam kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan, khususnya anak-anak perempuan. di India menemukan bahwa 35% dari 229 toilet di Delhi tidak mempunyai toilet khusus perempuan. Jika fasilitas yang diberikan kurang memadai untuk gender perempuan, maka tingkat pelecehan akan semakin besar. Lelaki yang sudah selesai menggunakan toilet, kebanyakan akan menggoda perempuan dan hal tersebut menimbulkan trauma untuk kedepannya (Babbar dkk. 2023). Jika anak-anak perempuan mengalami hal tersebut di sekolah, maka mereka akan memutuskan untuk tidak lagi bersekolah dan memilih untuk bekerja dan mengikuti struktur budaya.

Dalam bab kedua menjelaskan empat komponen utama dalam proses implemementasi kebijakan. Empat komponen tersebut yaitu *Idealized Policy*, *Target Group*, *Implementation Organization*, *Environmental Factors*. Kebijakan yang diidealkan yaitu kebijakan BBBP dengan kelompok sasaran anak-anak dengan rentang usia 6 hingga 18 tahun. Untuk menjembatani kebijakan BBBP, diperlukan organisasi pelaksana untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari implementasi kebijakan tersebut. Organisasi tersebut seperti Nanhi Kali, Educate Girls, dan CRY. Namun, terdapat halangan faktor lingkungan yang menyebabkan hambatan dari kebijakan tersebut yaitu seperti hambatan budaya dan tantangan ekonomi.

BAB 3

PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Dalam bab ini akan menjelaskan bagaimana proses implementasi kebijakan BBBP selama pemerintahan Narendra Modi. Proses implementasi kebijakan menurut Smith menjadi empat bagian yaitu *Tensions*, *Transactions*, *Institutions*, *Feedback*. Dalam proses implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan perencanaan dan pengambilan keputusan, tetapi juga penyesuaian melalui komponen yang saling mempengaruhi.

3.1 *Tensions*

Thomas B. Smith (1973) menyampaikan bahwa proses implementasi kebijakan tidak sesederhana pelaksanaan langsung setelah kebijakan disahkan. Dalam banyak studi kebijakan, terdapat asumsi bahwa setelah kebijakan ditetapkan oleh pemerintah, maka hasil yang diharapkan akan segera tercapai. Smith membantah asumsi ini dan menekankan bahwa implementasi adalah proses kompleks yang dipenuhi oleh berbagai bentuk ketegangan atau *tensions*. Smith mengembangkan model implementasi kebijakan yang berfokus pada interaksi antara empat komponen utama, yaitu kebijakan yang diidealkan (*idealized policy*), organisasi pelaksana (*implementing organization*), kelompok sasaran (*target group*), dan faktor lingkungan (*environmental factors*). Ketegangan muncul sebagai akibat dari ketidaksesuaian antara harapan dan realitas yang terdapat dalam dan antara komponen-komponen tersebut (Smith 1973, 205).

Menurut Smith (1973), *tensions* adalah kekuatan yang menggerakkan perubahan sosial. Ketegangan ini dapat terjadi dalam bentuk perbedaan persepsi, kepentingan, nilai, ataupun kapasitas antara aktor-aktor kebijakan. *Tensions* tidak hanya menghambat proses implementasi, namun juga dapat menjadi pemicu munculnya pola interaksi baru atau transaction patterns yang selanjutnya dapat berkembang menjadi institusi baru. *Tensions* dapat muncul dalam berbagai level, seperti individu (misalnya perbedaan persepsi antara aparat pemerintah dan masyarakat), kelompok (misalnya; konflik antar kelas sosial), atau struktur (misalnya; birokrasi yang tidak efisien) (Smith 1973, 207). Smith mengembangkan matriks tensions yang mencakup berbagai bentuk ketidaksesuaian, seperti antara ideal dan aktual, persepsi dan ekspektasi, serta harapan dan kenyataan (Hansson-Forman *et al.*, 2021). Dengan memahami *tensions* sebagai bagian integral dari implementasi kebijakan, maka pemerintah dan aktor kebijakan lainnya dapat merancang strategi yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial yang kompleks, terutama di negara-negara berkembang yang memiliki keragaman budaya dan struktur sosial seperti India.

Kebijakan Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) diluncurkan oleh Pemerintah India pada tahun 2015 sebagai respons terhadap meningkatnya kekhawatiran atas diskriminasi gender yang menyebabkan rendahnya angka partisipasi pendidikan anak perempuan. Meskipun kebijakan ini secara ideal bertujuan untuk menyelamatkan dan mendidik anak perempuan, proses implementasinya mengalami berbagai bentuk ketegangan sebagaimana dijelaskan dalam teori Smith. Pertama, ketegangan muncul antara kebijakan ideal dengan realitas budaya dan sosial. Pemerintah India

menginginkan adanya peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi anak perempuan di seluruh wilayah. Namun, di banyak daerah pedesaan dan komunitas tradisional, nilai-nilai patriarki masih sangat kuat. Anak perempuan sering kali dianggap sebagai beban ekonomi karena pada akhirnya akan menikah dan pindah ke rumah suami. Dalam konteks seperti ini, pendidikan bagi anak perempuan dipandang tidak memiliki nilai investasi jangka panjang. Ketegangan antara nilai modern yang diusung kebijakan dan nilai tradisional masyarakat menjadi penghambat utama implementasi (Kurhayadi, 2023).

Kedua, ketegangan juga terjadi antara pemerintah sebagai pemangku kebijakan dengan kelompok sasaran, yaitu keluarga dan anak-anak perempuan itu sendiri. Pemerintah berasumsi bahwa masyarakat akan menyambut baik kebijakan ini. Namun, banyak keluarga justru menunjukkan resistensi atau bahkan apatisme terhadap program ini. Mereka tidak terlibat aktif dalam proses sosialisasi dan pelaksanaan program. Ada juga kasus di mana keluarga memanipulasi data anak perempuan mereka untuk memperoleh insentif tanpa benar-benar mengizinkan anaknya melanjutkan pendidikan. Ketegangan ini menunjukkan perbedaan ekspektasi dan pemahaman antara pembuat kebijakan dan penerima manfaat (Sager & Hinterleitner, 2022).

Ketiga, di dalam organisasi pelaksana juga muncul berbagai bentuk ketegangan. BBBP melibatkan beberapa kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan, serta Kementerian Kesehatan. Meskipun struktur koordinasi sudah dirancang, implementasinya di lapangan sering kali tidak berjalan lancar. Terdapat keterlambatan penyaluran anggaran, kurangnya tenaga pelaksana di daerah terpencil,

serta lemahnya sistem pemantauan dan evaluasi. Ketegangan antara birokrasi ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih program, pemborosan sumber daya, dan inefisiensi dalam pelaksanaan (Hansson-Forman et al., 2021).

Keempat, persepsi masyarakat terhadap hasil program BBBP tidak selalu sejalan dengan klaim keberhasilan dari pemerintah. Pemerintah mengklaim telah terjadi peningkatan signifikan dalam rasio gender dan angka partisipasi sekolah anak perempuan. Namun, banyak organisasi masyarakat sipil dan lembaga penelitian independen yang menyatakan bahwa hasil tersebut tidak merata dan tidak mencerminkan realitas di akar rumput. Beberapa daerah melaporkan bahwa program ini lebih banyak terlihat dalam bentuk kampanye media dan kegiatan seremonial daripada kegiatan substantif yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Ketegangan ini memperlihatkan adanya jurang antara persepsi elite pembuat kebijakan dan persepsi masyarakat umum terhadap keberhasilan program.

Smith (1973) menekankan bahwa *tensions* dalam implementasi kebijakan tidak harus dilihat sebagai hambatan, tetapi sebagai indikator adanya kebutuhan untuk melakukan perubahan. Dalam konteks BBBP, ketegangan yang muncul dapat menjadi sinyal bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan agar lebih responsif terhadap realitas lokal. Salah satu strategi untuk merespons *tensions* adalah dengan memperkuat pendekatan partisipatif. Pemerintah dapat melibatkan tokoh masyarakat, pemimpin adat, dan organisasi lokal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Hal ini penting agar kebijakan tidak hanya dianggap sebagai produk pusat, tetapi juga menjadi bagian dari solusi yang relevan dengan kebutuhan lokal.

Selain itu, pemerintah perlu melakukan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan keberagaman budaya dan sosial di berbagai wilayah. Sosialisasi kebijakan harus dilakukan dengan mempertimbangkan bahasa lokal, norma adat, dan struktur sosial masyarakat. Dengan begitu, resistensi dapat diminimalisir dan partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan. Dalam aspek organisasi pelaksana, perlu dilakukan penguatan kapasitas melalui pelatihan, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta pengembangan sistem informasi dan pemantauan yang terintegrasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dijalankan secara efisien dan efek (Sager & Hinterleitner, 2022).

Konsep *tensions* dalam teori Thomas B. Smith (1973) memberikan kerangka penting dalam memahami kompleksitas implementasi kebijakan, terutama di negara-negara berkembang seperti India. Studi kasus kebijakan Beti Bachao Beti Padhao menunjukkan bahwa ketegangan antara kebijakan yang diidealkan dan kenyataan sosial, antara pemerintah dan masyarakat, serta antar lembaga pelaksana merupakan tantangan nyata yang harus dihadapi. Namun, dengan melihat *tensions* sebagai peluang untuk melakukan evaluasi dan adaptasi kebijakan, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih inklusif, partisipatif, dan kontekstual. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas kebijakan, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan sosial yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan. Dengan demikian, *tensions* tidak perlu ditakuti atau dihindari, tetapi harus dihadapi dengan pendekatan yang terbuka, reflektif, dan adaptif agar proses implementasi kebijakan benar-benar mampu menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat secara nyata dan berkelanjutan.

Selain itu, muncul pula ketegangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal pembagian tanggung jawab dan pengelolaan dana. Beberapa pemerintah daerah mengeluhkan minimnya pelibatan dalam tahap perencanaan program, sehingga mereka merasa hanya menjadi pelaksana teknis dari kebijakan yang dirancang secara sentralistik. Ketimpangan ini menimbulkan rasa tidak memiliki terhadap program dan berujung pada implementasi yang setengah hati. Ketegangan juga terlihat dalam pelaporan hasil yang tidak seragam antara tingkat pusat dan daerah, menimbulkan ketidakpastian data yang berdampak pada keakuratan evaluasi kebijakan (Kurhayadi, 2023). Dengan memahami seluruh spektrum ketegangan ini, maka refleksi menyeluruh terhadap struktur implementasi sangat diperlukan untuk keberlanjutan program.

3.2 *Transactions*

Pola pola transaksi merupakan salah satu tahapan yang penting untuk dilakukan oleh lembaga lembaga masyarakat untuk mengurangi ketegangan yang terjadi di antara pemangku kepentingan dan kelompok sasaran. Terbentuknya lembaga atau organisasi pelaksana menjadi perhatian khusus untuk melihat apakah kebijakan tersebut diimplementasi atau tidak (Smith 1973, 207). Hal ini menjadi tanggung jawab dari organisasi pelaksana untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari kebijakan itu sendiri.

Dalam negara negara dunia ketiga, sering kali tertulis mengenai kebijakan yang akan diimplementasikan baik dalam undang undang maupun ditempatkan dalam konstitusi, tetapi hal tersebut tidak terlaksana dengan baik dikarenakan proses

implementasi kebijakan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Sehingga, kebijakan yang diidealkan tidak dapat terlaksana dengan sungguh sungguh dan dalam proses penelitian, analisis harus bisa mengidentifikasi pendekatan organisasi pelaksana dalam menyampaikan kebijakan dari pemangku kepentingan (Smith 1973, 207).

Pada tahun 2022, Nanhi Kali membantu anak-anak yang kurang mampu untuk kembali mendaftar ke sekolah dengan target anak-anak kelas 1 hingga kelas 10. Setiap anak-anak menerima bantuan akademik berupa tablet digital, peralatan sekolah, alat tulis, jas hujan, dan bahan kebersihan untuk kebersihan wanita sekali setahun. Selain itu juga terdapat *Digital and Life Skills Training programmes*, yang bertujuan untuk memberdayakan anak-anak perempuan dengan rentang usia 16-19 tahun. Program ini mendorong pengetahuan dibidang akademik untuk masa depan mereka nantinya. Program ini telah diimplementasikan di Maharashtra dan Tamil Nadu dan telah mendukung sebanyak 31.908 anak-anak perempuan (Nanhi Kali's Report, 2022).

Program yang dijalankan oleh organisasi pelaksana *Educate Girls* yaitu Vidya. Sejalannya dengan program pemerintah BBBP, program ini membantu anak-anak perempuan dengan rentang umur 6 hingga 14 tahun untuk mengatasi anak-anak perempuan yang putus sekolah dan peningkatan pendaftaran di wilayah perdesaan di India yang melibatkan pemerintah dan komunitas masyarakat lainnya. Pada tahun 2023-24 tercatat pendaftaran kembali anak-anak perempuan putus sekolah yaitu sebesar 411,461 dan mencapai pendaftaran tertinggi dari tahun tahun sebelumnya. Program ini mulai menyebar ke distrik Uttar Pradesh di berbagai wilayah seperti Badaun, Farrukhabad, Hardoi, Kheri, Shahjahanpur, Sitapur, dan Barabanki. Selain mengidentifikasi 275.000 anak perempuan putus sekolah, program ini juga

memberikan sosialisasi mengenai kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan kembali anak-anak perempuan ke sekolah (Annual Report Educate Girls 2023-2024).

Program yang dikeluarkan oleh CRY yaitu Poori Padhai, Desh Ki Bhalai yang mengikuti program pemerintah BBBP, CRY memulai dengan bekerjasama dengan keluarga, guru, masyarakat dan pemerintah tingkat distrik dan anak-anak perempuan. Tujuan utama dalam program CRY yaitu mendaftarkan kembali anak-anak perempuan yang putus sekolah, pemberdayaan perempuan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, menghubungkan antara keluarga dan pemerintah, dan membangun kepercayaan anak-anak perempuan. Dalam program yang sudah dijalankan oleh CRY, 95% anak-anak yang berada di wilayah program CRY sudah terdaftar di sekolah dengan rentang usia 15-18 tahun (Child Right and You 2024).

Dari program program yang sudah dijalankan oleh organisasi pelaksana, maka diharapkan kebijakan yang diidealkan dapat diimplementasikan dengan sungguh sungguh. Organisasi pelaksana seperti Nanhi Kali, Educate Girls, dan CRY mempunyai tujuan yang sama dengan pemerintah untuk meningkatkan angka pendidikan terhadap anak-anak perempuan di India. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran kebijakan BBBP dapat menjadi kebijakan yang diidealkan sesuai dengan tujuan dan harapan bersama.

3.3 *Institutions*

Dalam kerangka teori implementasi kebijakan publik oleh Thomas B. Smith (1973), *institutions* tidak sekedar dipahami sebagai organisasi pemerintahan formal, tetapi mencakup jaringan kekuasaan, norma sosial, nilai budaya, dan praktik birokrasi

yang membentuk medan tempat berlangsungnya proses implementasi. Smith (1973) memandang bahwa implementasi kebijakan bukanlah proses linear, melainkan proses yang menghasilkan ketegangan (*tensions*) antara aktor dan struktur yang terlibat. Ketegangan inilah yang akan menentukan apakah kebijakan bisa dijalankan secara efektif, gagal, atau berubah arah.

Smith juga menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “*deliberate action by a government to establish new transaction patterns or institutions or to change established patterns within old institutions*” (Smith 1973, 202). Artinya, setiap kebijakan adalah upaya negara untuk merekonstruksi tatanan sosial melalui pembentukan atau transformasi *institutions*. Namun, proses ini tak pernah bebas dari ketegangan. Ia menekankan bahwa “*policy implementation is seen as a tension-generating force in society*” (Smith 1973, 197), dan karena itu, implementasi menjadi arena interaksi antara komponen ideal kebijakan, organisasi pelaksana, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan.

Smith (1973) mengembangkan model implementasi kebijakan yang terdiri dari empat komponen utama yaitu *idealized policy*, *implementing organization*, *target group*, dan *environmental factors*. Ketegangan muncul baik di dalam komponen-komponen tersebut (intra) maupun antar komponen (inter). Misalnya, ketika suatu organisasi pelaksana tidak memiliki sumber daya atau otoritas yang cukup untuk menjalankan kebijakan, akan terjadi *within-component tension*. Begitu pula ketika target group menolak kebijakan yang dirumuskan secara *top-down*, muncullah *between-component tension*. Ketegangan ini kemudian memunculkan pola interaksi baru yang disebut *transaction patterns*, yaitu pola interaksi yang belum permanen,

tetapi menjadi cikal bakal lahirnya *institutions* baru. Namun, tidak semua pola ini berhasil menjadi *institutions*, banyak juga yang berakhir sebagai fragmentasi kebijakan. Seperti yang dikatakan Smith, “*transaction patterns may become crystallized into institutions. Both the transaction patterns and the institutions may generate tensions...*” (Smith 1973, 197).

Contoh nyata dari konsep ini dapat dilihat dalam implementasi kebijakan Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) di India, yang diluncurkan tahun 2015 oleh pemerintahan Narendra Modi. Program ini ditujukan untuk melawan diskriminasi terhadap anak perempuan dengan mendorong kelahiran, perlindungan, dan pendidikan bagi mereka. Secara formal, program ini melibatkan tiga kementerian besar yaitu *Ministry of Women and Child Development* (MWCD), *Ministry of Health and Family Welfare* (MoHFW), dan *Ministry of Education* (MoE) (Widyaputri, 2024). Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini menunjukkan berbagai *institutional tensions* sebagaimana dijelaskan Smith (1973);

a) Koordinasi Lintas Lembaga yang Lemah

Temuan dari *Comptroller and Auditor General* (CAG) India pada 2018 menunjukkan bahwa hanya sekitar 25% anggaran BBBP yang digunakan untuk implementasi di lapangan, sementara sisanya digunakan untuk kampanye media. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi lebih fokus pada aspek simbolik daripada perubahan substantif. Terjadi pergeseran dari *idealized policy* ke realitas pelaksanaan yang didominasi oleh kebutuhan legitimasi politik pusat. Ini menciptakan ketegangan antara tujuan awal dan tindakan nyata.

b) Kapasitas Lembaga Daerah yang Tidak Memadai

Dalam sistem pemerintahan yang desentralistik, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada pemerintah daerah, panchayat, dan lembaga pendidikan lokal. Namun, banyak dari institusi ini tidak memiliki sumber daya manusia, infrastruktur, atau mekanisme pengawasan yang memadai. Di beberapa wilayah seperti Haryana dan Uttar Pradesh, implementasi hanya terjadi secara administratif tanpa perubahan nyata dalam angka partisipasi sekolah anak perempuan (Widyaputri, 2024). Situasi ini mencerminkan apa yang dikemukakan Smith sebagai *discrepancy between the ideal and the actual*, yakni adanya ketidaksesuaian antara kondisi ideal yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan kondisi aktual di lapangan (Smith 1973, 206).

c) Hambatan Sosial-Budaya sebagai Institusi Non-Formal

Institusi sosial seperti norma patriarkal, pandangan bahwa perempuan hanya layak untuk pekerjaan domestik, hingga rendahnya literasi ibu, merupakan faktor yang tak kalah penting. Di banyak daerah di India, norma ini menjadi benteng kuat yang sulit ditembus oleh kebijakan (Latifa et al., 2025). Smith (1973) menyatakan bahwa “*environmental factors may be a constraining corridor through which the implementation of policy must be forced*” (Smith 1973, 205). Bila lingkungan sosial tidak berubah, maka keberhasilan kebijakan juga terhambat.

d) Persepsi dan Ekspektasi yang Bertentangan

Banyak aktor kebijakan di tingkat pusat memiliki ekspektasi bahwa masyarakat akan menyambut baik program ini. Namun, kenyataannya,

masyarakat kadang bersikap apatis atau bahkan menolak. Smith (1973) menyebut ketegangan ini sebagai “*discrepancy between expected and actual*” (Smith 1973, 206). Di sinilah pentingnya membangun *institutions* yang mampu menjembatani kesenjangan antara intensi dan persepsi lokal.

Dalam kerangka Smith (1973), keberadaan *institutions* bukan hanya sebagai alat pelaksana, tetapi sebagai arena negosiasi dan adaptasi. Smith menyebutkan bahwa “*institutions are not static entities, but arenas where policy actors interact, negotiate, and even conflict*” (Smith 1973, 208). Oleh karena itu, efektivitas *institutions* diukur dari kemampuannya menyesuaikan diri dengan ketegangan yang muncul selama proses implementasi. Contoh positif dari penerapan ini terlihat di Distrik Pune (Maharashtra), di mana pemerintah daerah berkolaborasi dengan NGO dan tokoh lokal untuk mengintegrasikan BBBP dengan program literasi ibu dan pelatihan keterampilan remaja perempuan. Inisiatif ini berhasil menurunkan angka perkawinan usia dini dan meningkatkan partisipasi sekolah. Hal ini mencerminkan bahwa *institutions* yang adaptif dan kontekstual memiliki peran besar dalam mewujudkan transformasi sosial melalui kebijakan (Widyaputri, 2024).

Smith (1973) menyatakan bahwa asumsi bahwa kebijakan yang sudah dirumuskan pasti akan diimplementasikan adalah tidak valid, khususnya di negara berkembang. Birokrasi yang lemah, norma yang tidak mendukung, serta kurangnya kapasitas *institusional* sering menjadi hambatan utama. Hal ini diperkuat oleh Nurmayana (2022) yang menyatakan bahwa kelemahan desain *institusional* dapat mengakibatkan kebijakan hanya berjalan di atas kertas. Sejalan dengan itu, Rakista (2020) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh struktur

organisasi dan pola komunikasi antar aktor pelaksana. Bila struktur dan komunikasi tidak berjalan efektif, maka kebijakan cenderung tidak mencapai tujuannya. Indra (2023) juga menekankan pentingnya penguatan institusi lokal dalam implementasi kebijakan, khususnya dalam konteks otonomi daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *institutions* adalah aktor kolektif yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Ketegangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses ini, dan *institutions* yang berhasil adalah yang mampu mengelola ketegangan tersebut menjadi kolaborasi produktif. *Institutions* yang kuat bukan hanya yang memiliki struktur formal, tetapi yang mampu beradaptasi dengan lingkungan, mengakomodasi norma lokal, dan menjalin hubungan lintas aktor. Oleh karena itu, dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan, pembuat kebijakan harus melihat *institutions* bukan sebagai alat birokrasi semata, tetapi sebagai arena dinamis tempat terjadinya perubahan sosial. Seperti yang disampaikan Smith (1973), “*policy implementation is a continuous process that may never have a final and definite end*” (Smith 1973, 209).

3.4 Feedback

Proses implementasi kebijakan yang terakhir adalah umpan balik. Umpan balik merupakan respons dari kelompok sasaran terhadap implementasi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemangku kepentingan maupun lembaga dan organisasi terkait. Umpan balik merupakan salah satu proses penting untuk melihat proses dari implementasi kebijakan, apakah kebijakan tersebut akan berkelanjutan dan berkesinambungan dengan isu yang sedang terjadi. Respon yang dikeluarkan oleh

kelompok sasaran dan penerima manfaat dapat berupa respons baik maupun menolak adanya kebijakan tersebut (Smith 1973, 209).

Pada tahun 2019 terdapat program “Kanya Shiksha Pravesh Utsav”, dengan tujuan mendaftarkan kembali anak-anak perempuan yang terputus sekolah dengan usia 11-14 tahun, agar kembali melanjutkan pendidikan dengan bantuan dan kerjasama dari berbagai kementerian dan lembaga UNICEF. Menurut Mr. Yasumasa Kimura, wakil perwakilan UNICEF India, program pendidikan untuk anak perempuan tidak hanya memenuhi hak mereka untuk belajar, tetapi juga membangun potensi sebagai individu dan warga dunia. Salah satu perwakilan dari penerima manfaat kebijakan yaitu Shreya, seorang gadis dari Delhi menyatakan bahwa dengan adanya program “Kanya Shiksha Pravesh Utsav” dapat mewujudkan kembali cita-citanya menjadi seorang petugas investigasi (Ministry of Women and Child Development 2022).

BBBP membawa perubahan besar terhadap peningkatan pendaftaran anak-anak perempuan di India. Perubahan juga didukung melalui keterlibatan masyarakat, kampanye kesadaran, dan penegakan hukum yang kuat. Kuatnya peran pemerintah dan NGO dalam mengimplementasikan kebijakan, membuat perubahan yang signifikan. Haryana adalah salah satu wilayah di India yang terkenal dengan rasio jenis kelamin yang tidak merata, dengan adanya BBBP di wilayah tersebut memberikan dampak yang baik seperti peningkatan pendidikan perempuan. Pendekatan yang dilakukan seperti membantu menciptakan sekolah yang aman dan ramah bagi perempuan (Kumar 2023).

Dikutip dari Educate Girls, banyak anak-anak perempuan yang kembali mendaftarkan diri ke sekolah untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Sitapur

merupakan salah satu desa terpencil yang berada di wilayah Uttar Pradesh. Dalam program yang sejalan dengan BBBP, Educate Girls membantu salah satu anak perempuan yang bernama Esha untuk kembali bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak. Educate Girls memberikan sosialisasi kepada orang tua dari Esha mengenai pentingnya pendidikan bagi anak perempuan (Educate Girls 2025).

Program BBBP telah banyak mempengaruhi tingkat kesetaraan gender pada masa awal jabatan Narendra Modi meskipun membutuhkan waktu untuk membuktikan hasil dari kebijakan tersebut. Dengan adanya program BBBP mendukung penuh anak perempuan dan perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan tanpa adanya kesenjangan dan kesetaraan gender. Dalam BBBP pemerintah juga menyediakan program beasiswa terhadap perempuan agar mengurangi biaya dan tidak terhalang ekonomi.

Selama sembilan tahun BBBP dijalankan dibawah pemerintahan Narendra Modi, BBBP telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pendidikan dan pemberdayaan terhadap perempuan seperti peningkatan partisipasi kasar perempuan di sekolah menengah pada tahun 2014-15 yaitu 75,51% dan pada tahun 2023-24 menjadi 78%. Serta, dengan adanya program BBBP, telah mendaftarkan 100.000 anak perempuan yang putus sekolah di berbagai wilayah di India (Ministry of Women and Child Development 2025). Program BBBP telah banyak mempengaruhi tingkat kesetaraan gender pada masa awal jabatan Narendra Modi meskipun membutuhkan waktu untuk membuktikan hasil dari kebijakan tersebut.

Skema BBBP menjadi salah satu program untuk mengurangi diskriminasi terhadap gender di bawah pantauan beberapa lembaga. Dari isu gender dan

diskriminasi terhadap perempuan secara langsung ditangani oleh Narendra Modi walaupun banyak tantangan dan hambatan seperti kurangnya data dan proses kemajuan kebijakan yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pembuktian dan hasil kebijakan. Setelah semua kebijakan dan program terlaksana masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk terus meningkatkan program BBBP yaitu seperti menata ulang tujuan dalam jangka waktu panjang dan pendek (Agarwal dkk. 2025).

Dalam bab ketiga menjelaskan mengenai proses implementasi kebijakan menurut Thomas B. Smith, dengan melalui tahapan yaitu *Tensions, Transactions, Institutions,* dan *Feedback*. Dalam proses implementasi kebijakan terdapat ketegangan seperti kebijakan ideal dengan realitas budaya dan sosial. Tetapi, untuk mengatasi hal tersebut organisasi pelaksana menggunakan pendekatan dengan menghubungkan antara kelompok sasaran, masyarakat, dan pemerintah. Setelah proses implementasi tersebut berjalan, maka akan ada respons menerima dan menolak kebijakan tersebut.

BAB 4

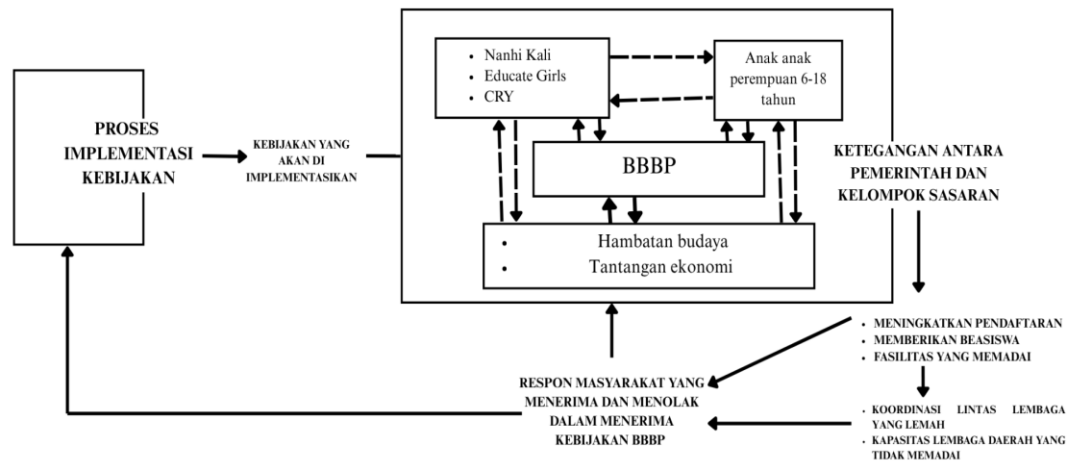
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

India pernah berada di posisi yang sangat rendah dalam tingkat pendidikan, hal ini menjadi pemicu utama bagi Narendra Modi untuk menyikapi permasalahan di India agar tidak lagi terjadi kesenjangan dengan negara lain dalam kategori pendidikan. Narendra Modi mengambil sikap tegas untuk memprioritaskan masalah pendidikan seperti pada masa awal menjabat sebagai Perdana Menteri India yaitu mengeluarkan program BBBP. Selama sepuluh tahun BBBP diimplementasikan, banyak perubahan yang signifikan dalam pendidikan terhadap anak-anak perempuan di India.

Hasil dari penjelasan yang telah dipaparkan penulis dalam penelitian ini yaitu dapat dipahami bahwasanya tingkat pendidikan di India terus meningkat semenjak Narendra Modi menjadi Perdana Menteri India pada tahun 2019 hingga saat ini. Dalam penelitian ini penulis telah memaparkan upaya yang dilakukan Narendra Modi dalam meningkatkan angka pendidikan terhadap anak dan perempuan. Dengan adanya program BBBP menjadi pendorong bagi perempuan agar terus melanjutkan pendidikan tanpa adanya diskriminasi gender.

Gambar 4.1 Proses Implementasi Kebijakan Menurut Smith



Sumber: Diolah dari Thomas B. Smith (1973)

Struktur proses implementasi kebijakan di bawah kepemimpinan Narendra Modi telah mencerminkan pendekatan yang terorganisir serta berfokus kepada efektivitas dalam pemerintahan sesuai yang telah dipaparkan oleh Thomas B. Smith. Berawal dari permasalahan tingkat pendidikan di India yang cukup rendah bagi perempuan, Narendra Modi mengimplementasikan kebijakan BBBP untuk menangani isu ketimpangan pendidikan di India. Untuk hasil analisis dalam proses implementasi kebijakan akan dijelaskan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1 Hasil Analisis Studi Kasus Menggunakan Strategi Proses Implementasi Kebijakan

Strategi Proses Implementasi Kebijakan	Defenisi	Hasil Analisis
<i>Idealized Policy</i>	Kebijakan yang akan diidealkan untuk mencapai tujuan seperti yang diharapkan oleh pemangku kebijakan.	Kebijakan BBBP adalah kebijakan yang diidealkan dibawah pemerintahan Narendra Modi untuk meningkatkan pendidikan anak-anak perempuan di India.

<i>Target Group</i>	Kelompok sasaran yang akan mendapatkan dampak dan manfaat kebijakan.	Kelompok sasaran yaitu anak-anak perempuan dengan rentang usia 6-18 tahun yang mengalami kondisi putus sekolah.
<i>Implementation Organizations</i>	Organisasi yang menjembatani kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.	Terdapat beberapa NGO yang menjembatani kebijakan BBBP yang sejalan dengan pemerintah diantaranya yaitu Nanhi Kali, <i>Educate Girls</i> , dan CRY.
<i>Environmental Factors</i>	Faktor faktor yang menjadi hambatan untuk proses implementasi kebijakan .	Di India terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya angka putus sekolah terhadap anak-anak perempuan, diantaranya yaitu hambatan sosial, budaya, dan ekonomi.
<i>Tensions</i>	Ketegangan dan tekanan yang terjadi selama proses implementasi kebijakan dengan memperhatikan empat komponen utama yaitu <i>Idealized Policy, Target Group, Implementation Organization, Environmental Factors</i> .	Ketegangan yang terjadi selama proses implementasi kebijakan yaitu seperti ketegangan antara kebijakan ideal dengan realitas budaya dan sosial, ketegangan antara pemerintah sebagai pemangku kebijakan dengan kelompok sasaran, persepsi masyarakat terhadap hasil program BBBP tidak selalu sejalan dengan klaim keberhasilan dari pemerintah.
<i>Transactions</i>	Program yang dijalankan oleh organisasi pelaksana untuk menjembatani kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang sejalan dengan kebijakan yang diidealkan.	Dalam menyampaikan kebijakan BBBP, program yang dijalankan oleh organisasi pelaksana yaitu mendaftarkan kembali anak-anak perempuan ke sekolah, dan beberapa program lainnya dari organisasi pelaksana seperti Vidya dan Poori Padhai, Desh Ki Bhalai.
<i>Tensions</i>	<i>Institutions</i> tidak sekedar dipahami sebagai organisasi pemerintahan formal, tetapi mencakup jaringan kekuasaan,	Secara formal, program ini melibatkan tiga kementerian besar yaitu <i>Ministry of Women and Child Development (MWCD), Ministry of Health and Family</i>

	norma sosial, nilai budaya, dan praktik birokrasi yang membentuk medan tempat berlangsungnya proses implementasi.	<i>Welfare</i> (MoHFW), dan <i>Ministry of Education</i> (MoE) namun terdapat kelemahan dari institusi tersebut yaitu koordinasi lintas lembaga yang lemah, dana yang tidak memadai, dan ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah dalam proses implementasi BBBP
<i>Feedback</i>	Respons dari kelompok sasaran maupun masyarakat terhadap implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, respons yang dikeluarkan bisa saja menerima dan menolak kebijakan tersebut.	Respons baik dari masyarakat dan beberapa perwakilan anak-anak perempuan yang menerima kebijakan BBBP dalam meningkatkan pendidikan. Seperti di Sitapur yang merupakan salah satu desa terpencil yang berada di wilayah Uttar Pradesh.

Sumber: Diolah dari Thomas B. Smith 1973, hal. 197-207

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.1, maka dapat disimpulkan bahwa, strategi yang digunakan dalam proses implementasi kebijakan dijalankan oleh Narendra Modi terbukti berhasil dalam meningkatkan pendidikan anak dan perempuan di India. Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan penulis, kebijakan yang diimplementasikan oleh Narendra Modi memberikan kontribusi positif untuk mengurangi ketimpangan pendidikan terhadap perempuan. Program BBBP tidak hanya memberikan peningkatan hanya kepada satu aspek, tetapi juga berupaya untuk mengubah pandangan sosial yang menghambat partisipasi perempuan dalam pendidikan.

Meskipun demikian, tantangan dan hambatan yang dirasakan oleh Pemerintah Narendra Modi masih tetap ada. Seperti kesulitan bagi wilayah pedesaan maupun terpencil masih mengalami kesulitan untuk mengakses pendidikan yang berkualitas.

Selain itu, terdapat faktor lainnya seperti kemiskinan, budaya patriarki, norma sosial, dan kurangnya infrastruktur pendidikan menjadi hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, meskipun kebijakan yang ada telah memberikan dampak positif terhadap pendidikan di India, masih diperlukan upaya yang lebih intensif dan terintegrasi untuk mencapai kesetaraan gender dan pendidikan.

4.2 Rekomendasi

Dari pembahasan penelitian ini yang membahas mengenai kebijakan Narendra Modi terhadap ketimpangan pendidikan di India, penelitian ini masih berfokus kepada keberhasilan Narendra Modi dalam bidang pendidikan saja. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar penelitian selanjutnya dapat melihat dan menganalisis kekurangan dan kegagalan dari upaya kebijakan BBBP yang telah dilakukan oleh Narendra Modi agar menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan untuk masa depan. Penulis juga merekomendasikan untuk melakukan studi yang lebih mendalam khususnya untuk daerah terpencil di India sebagai bentuk perbandingan perbedaan dampak kebijakan di daerah kota dan pedesaan. Hal ini dikarenakan agar pemerintah dapat melihat dan memberikan kebijakan yang adil terhadap wilayah yang terpencil tanpa adanya perbedaan dari kedua wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agarwal, Anjali, Meeta Rathi, dan Monica Sabharwal. 2025. "Evaluation Summary Beti Bachao, Beti Padhao | ISPP." Februari 11. <https://www.ispp.org.in/evaluation-summary-beti-bachao-beti-padhao-2015-2022/>.
- Agneta Kristalia Tedjo, Mohammad Daffa Ramadhan, Muhammad Daffa Dirgantara, dan Raden Arief Meivio Bahari. t.t. "Tantangan Budaya dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di India dan Solusinya." *Universitas Padjajaran*.
- Audina, Dhea Januastasya. 2022. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2 (4): 4. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>.
- Avni Arora. t.t. "Beti Bachao, Beti Padhao' Scheme: A Critical Analysis." Orfonline.Org. Diakses 29 Juli 2025. <https://www.orfonline.org/english/expert-speak/beti-bachao-beti-padhao-scheme>.
- Babbar, Karan, Upasak Das, Sania Ashraf, Alex Shpenev, dan Cristina Bicchieri. 2023. "Unlocking the Role of Social Norms: How They Shape Women's Public Toilet Usage in India." *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene* 109 (5): 1177–86. <https://doi.org/10.4269/ajtmh.23-0220>.
- Child Right and You. 2020. "CRY India - Most Trusted Top NGO For Children That Works On Child Rights." *CRY - Give Children a Happy, Healthy and Creative Childhood | CRY - India's leading non-profit*, Mei 15. <https://www.cry.org/>.
- Child Right and You. 2024. "Donate To CRY To Protect India's Girls From Poverty." *CRY - Give Children a Happy, Healthy and Creative Childhood | CRY - India's leading non-profit*, Juni 21. <https://www.cry.org/ensure-young-girls-complete-their-education/>.
- Educate Girls. 2025. "Esha's Journey Back to Education with Community Support - Educate Girls." April 8. <https://educategirls.ngo/blog/eshas-journey-back-to-education-with-community-support/>.
- Educate Girls. t.t. "Charity for girl child education in India: Educate Girls." Diakses 30 Juli 2025. <https://www.educategirls.ngo/who-we-are/>.
- Ferisca, Yoana Septiani Setiya, Ningsih Susilawati, dan Ida Bagus Putu Aditya. t.t. *India Government Policies in Handling Gender-Based Violence against Women during the COVID-19 Pandemic: A Feminist Perspective*.
- Hansson-Forman, Katarina, Elsa Reimerson, Therese Bjärstig, dan Camilla Sandström. 2021. "A View through the Lens of Policy Formulation: The Struggle to Formulate Swedish Moose Policy." *Journal of Environmental Policy & Planning* 23 (4): 528–42. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2021.1888700>.

- Hussein, Aadil, dan Swaroopa P. K. t.t. “WOMEN EDUCATION IN INDIA: ISSUES AND CHALLENGES.” 2024.
- Informasi, Rusman | Dir Teknologi. 2015. “Kekerasan Seksual di India: Relasi Kuasa Kasta dan Gender.” *The Global Review*, Maret 17. <https://theglobal-review.com/kekerasan-seksual-di-india-relasi-kuasa-kasta-dan-gender/>.
- Jenna Cook. 2025. “Educational Disparities Among Girls in India.” Ballard Brief, Juni 22. <https://ballardbrief.byu.edu/issue-briefs/educational-disparities-among-girls-in-india>.
- Kanji, Shireen, Fiona Carmichael, Christian Darko, Richmond Egyei, dan Nicholas Vasilakos. 2024. “The Impact of Early Marriage on the Life Satisfaction, Education and Subjective Health of Young Women in India: A Longitudinal Analysis.” *The Journal of Development Studies* 60 (5): 705–23. <https://doi.org/10.1080/00220388.2023.2284678>.
- Kishor, Prashant. 2022. “Know What are the Scheduled Castes and Scheduled Tribes?” Politics. *Youth In Politics - Blog*, Oktober 12. <https://www.youthinpolitics.in/blog/know-what-are-the-scheduled-castes-and-scheduled-tribes/>.
- Kristian, Indra. 2023. *KEBIJAKAN PUBLIK DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA*. 21 (2).
- Kumar, Gaurav. 2023. *Catalyzing Gender Equality: A Comprehensive Evaluation of the Beti Bachao, Beti Padhao Policy in India*.
- Kurhayadi, Kurhayadi. 2023. “Public Policy Implementation: A Theoretical Review.” *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah* 5 (1): 10–18. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v5i1.23742>.
- Kurnia, Nining, Khairur Rizki, dan Zulkarnain Zulkarnain. 2023. “Keamanan Manusia dalam Pengaruh Tradisi Dowry di India Terhadap Kekerasan Berbasis Gender di India.” *Indonesian Journal of Global Discourse* 5 (1): 73–89. <https://doi.org/10.29303/ijgd.v5i1.87>.
- Ministry of Women and Child Development. 2022. “Ministry of Women And Child Development In Partnership With The Ministry Of Education and UNICEF Launches Campaign ‘Kanya Shiksha Pravesh Utsav’ To Bring Back Out of School Adolescent Girls To The Formal Education.” PIB DELHI. <https://www.pib.gov.in/www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1803748>.
- Ministry of Women and Child Development. 2025. “Ministry of Women and Child Development set to celebrate 10th anniversary of Beti Bachao Beti Padhao scheme.” <https://www.pib.gov.in/www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=2094724>.

- Ministry of Women and Child Development. t.t. “Empowering India’s Daughters.” PIB DELHI. Diakses 29 Juli 2025. <https://www.pib.gov.in/www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=2094929>.
- Mishra, Santanu. t.t. “Breaking Barriers: Advancing Education for the Girl Child in India and Beyond.” *Diplomatist*. Diakses 31 Juli 2025. <https://diplomatist.com/2025/03/11/breaking-barriers-advancing-education-for-the-girl-child-in-india-and-beyond/>.
- Nanhi Kali. t.t. *Our History Nanhi Kali*. Diakses 30 Juli 2025. <https://www.nanhikali.org/our-history>.
- Open Government Data (OGD) platform India. 2022. “Drop-Out Rate from 2012-13 To 2014-15.” Januari 21. <https://data.gov.in>.
- Paranthaman, G, S Santhi, R Radha, dan G Poornima Thilagam. 2019. “INDIAN WOMEN STATUS: A HISTORICAL PERSPECTIVE.” *Muallim Journal of Social Science and Humanities*, April 1, 258–66. <https://doi.org/10.33306/mjssh19>.
- PM INDIA. t.t. “Beti Bachao, Beti Padhao: Caring for the Girl Child.” Diakses 29 Juli 2025. https://www.pmindia.gov.in/en/government_tr_rec/beti-bachao-beti-padhao-caring-for-the-girl-child/.
- Pradhan, Neeti. t.t. “Barriers to Education among Dalit Girls: Accessibility of Educational Opportunities in Nepal.” 2021.
- Rakista, Putri Mutiara. 2020. *POLICY IMPLEMENTATION OF THE INDONESIA PINTAR PROGRAM (PIP)*. 8.
- Rana, Kadambari. t.t. “Why Educating Women Is More Important than We Realize | UNESCO.” Diakses 30 Juli 2025. <https://www.unesco.org/en/articles/why-educating-women-more-important-we-realize>.
- Roy, Partha. 2018. *EFFECTS OF POVERTY ON EDUCATION IN INDIA*. 5 (8).
- Sager, Fritz, dan Markus Hinterleitner. 2022. “The Politics of Policy Implementation: A Reassessment in More Conflictual Times.” Dalam *Handbook on the Politics of Public Administration*, disunting oleh Andreas Ladner dan Fritz Sager. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781839109447.00016>.
- Sahu, Debashish, Dhruv Sawhney, Anand Pandey, dan Badri Narayanan. 2020. *Barriers In Improving Education Quality: A Case Study Of Rural India*.
- Santria Agusti dan Karina Utami Dewi. 2024. “(PDF) Violence against Indian Dalit Women under Narendra Modi Government: Johan Galtung’s Cultural Violence Analysis.” *ResearchGate*, advance online publication, Oktober 29. <https://doi.org/10.20473/jgs.17.2.2023.401-416>.
- Smith, Thomas B. t.t. “The Policy Implementation Process.” 1973.

- Thakur, Sweta. 2024. *Problems Of Women's Education In India, How to Improve It. Women Empowerment*. Maret 11. <https://daanpatra.org/problems-of-womens-education-in-india/>.
- Thelwell, Kim. 2019. "Top 10 Facts About Girls' Education in India." *The Borgen Project*, Mei 1. <https://borgenproject.org/top-10-facts-about-girls-education-in-india/>.
- UN Women. 2013. "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) for Youth." UN Women – Headquarters, Mei 1. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2016/12/cedaw-for-youth>.
- U-Report India. t.t. "U-Report India." Diakses 30 Juli 2025. <https://india.ureport.in>.
- Yadav, Seema. 2023. "Understanding the Dropout Crisis: Girls' Education in India and The Impact of Girls' Dropout on Education in India." *Learning Community-An International Journal of Educational and Social Development* 14 (1). <https://doi.org/10.30954/2231-458X.01.2023.3>.
- Yonna Beatrix Salamor dan Anna Maria Salamor. 2022. "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)." *Balobe Law Journal* 2 (1): 1. <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791>.